

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Abdulkadir, Muhammad. 2015. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT.Cita Raditya Bakti
- Atmasasmita, Romli. 2011. *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Erlangga dkk. 2015. *KUHP dan KUHP Dilengkapi Pasal-Pasal penting KUHP yang Perlu Diperhatikan & Penjelasan Proses Penanganan Kasus Pidana*. Jakarta: Justice Publishing
- Hamzah, Andi. 2012, *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika
- Harahap, M.Yahya. 2003. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHP : Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi Dan Peninjauan Kembali*. Jakarta: Sinar Grafika
- Ibrrahim, Johnny. 2006. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing
- Jubair. 2003. *Masalah Perlindungan Saksi Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Surabaya: Karunia
- Lubis, Sofyan. 2003. *Pelanggaran Miranda Rule Dalam Praktik Peradilan*. Yogyakarta: Liberty
- Mamudji, Sri dan Soerjono Soekanto. 2004. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada
- Muhammad, Abdulkadir. 2015. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT.Cita Raditya Bakti

- Mulyadi, Lilik. 2007. *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana : Teori, Praktik, Teknik Penyusunan dan Permasalahannya*. Bandung: Citra Aditya Bakti
- Prakoso, Djoko. 1988. *Pemecahan Perkara Pidana (Splitsing)*. Yogyakarta: Liberty
- R.Soesilo. 1996. *Teknik Berita Acara (Proses Verbal) Ilmu Bukti, dan Laporan*. Bogor: Politeia
- Ronny, Hanitijo Soemitro. 1998. *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Sasangka, Hari dan Lily Rosita, 2003, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*, Bandung: Mandar Maju
- Subekti dan R. Tjitrosoedibio. 1976. *Kamus Hukum*. Jakarta: Pradnya Paramita
- Sudaryono dan Natangsa Surbakti. 2005. *Hukum Pidana*. Surakarta: MUP
- Sunarso, Siswanto. 2015. *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika
- Surachmad, Wirjono. 1973. *Dasar dan Teknik Research: Pengertian Metodologi Ilmiah*. Bandung: Cutarito
- Suryono Sutarto. 1991. *Hukum Acara Pidana Jilid 1*. Semarang: Badan Penerbit Undip
- Soerjono Soekanto. 1984. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia
- Waluyo, Bambang. 2008. *Pidana Dan Pemidanaan*. Jakarta: Sinar Grafika

B. ARTIKEL JURNAL/MAKALAH

- Amrulloh. 2014. *Paradigma Saksi Mahkota Dalam Persidangan Pidana di Indonesia*. Jurnal ilmiah Peuradeun Vol.II
- Feriza, Gousta dan Achmad Saifudin Firdaus. *Kedudukan Terdakwa Sebagai Saksi (saksi mahkota) Terhadap Terdakwa Lain Dalam Tinjauan Hukum Acara Pidana*, *Lex Jurnalic*. Volume 12 Nomor 3
- Fitriasih, Surastini. 2001. *Makalah Ketentuan Mengenai Korban dan Saksi Dalam Proses Peradilan Pidana dan Urgensi Pengaturan Perlindungan Bagi Mereka*. Jakarta
- Fajar, M.Pandu. 2016. *Pemisahan Berkas Perkara oleh Penuntut Umum Dalam Proses Pembuktian Suatu Tindak Pidana dengan Delik Penyertaan*. Skripsi. Semarang: Universitas Negeri Semarang
- Ismail. 2018. *Peranan Saksi Mahkota Dalam Proses Pembuktian Perkara Pidana Di Indonesia*. Tesis. Universitas Hasanuddin
- Loebby Loqman. 1995. *Saksi Mahkota*, *Forum Keadilan*. Nomor 11
- Mahkamah Agung RI. 2003. *Beberapa Makalah Tentang Hukum Acara Pidana dan Peradilan Hak Asasi Manusia*
- Maulana, Irfan. 2015. *Kedudukan Saksi Mahkota dalam Proses Peradilan Pidana di Indonesia Berdasarkan Asas Non Self Incrimination*. Artikel Ilmiah. Universitas Brawijaya
- Rompas, Christian. 2016. *Pemecahan Perkara Pidana (splitsing) Sebagai Upaya Untuk Mempercepat Proses Pembuktian*. Jurnal Lex Privatum Vol.IV/No.2/Feb

Sukadana Made, Amiruddin & Lalu Parman. 2018. *Alat Bukti Keterangan Saksi Mahkota dalam Perkara Pidana Pencurian. Jurnal Law Reform.*
Semarang: Universitas Diponegoro

C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik
Indonesia

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International
Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR)

Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan
Korban

Putusan Mahkamah Agung No. 1986 K/Pid/1989 tanggal 21 Maret 1990

Surat Edaran Kejaksaan Agung Republik Indonesia No. B-69/E/02/1997
perihal Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011. Perlakuan Bagi
Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) Dan Saksi Pelaku Yang
Bekerjasama (*Justice Collaborators*) Di Dalam Tindak
Pidana Tertentu

Rancangan Undang-Undang Kitab Hukum Acara Pidana Tahun 2010

D. HALAMAN WEB

<http://learninghub.icjr.or.id/perbedaan-saksi-mahkota-dan-justice-collaborator-dalam-hukum-acara-pidana/> diakses tgl 19 april 2019, pukul 15.43WIB